

**SURAT KETERANGAN DOKTER  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Memperoleh Derajat Gelar S-2**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Disusun oleh :**

**NOKA NOVITA**

**NIM : 201610380211002**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**Oktober 2018**

**SURAT KETERANGAN DOKTER  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

Diajukan oleh :

**NOKA NOVITA  
201610380211002**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Jum'at/ 14 Desember 2018**

Pembimbing Utama



**Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M. Hum**

Pembimbing Pendamping

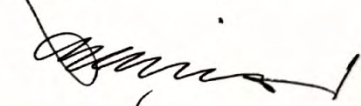


**Dr. Haris Tofly, SH., MH.**



**Akhsharudin, Ph.D**

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



**Mokh Najih, Ph.D**

# TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**NOKA NOVITA**

201610380211002

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Selasa/ **30 Oktober 2018**  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

**Ketua** : Dr. Sidik Sunaryo, SH., M. Si., M.Hum.  
**Sekretaris** : Dr. Haris Tofly, SH., MH.  
**Penguji I** : Dr. Tongat, SH.,M. Hum.  
**Penguji II** : Dr. Fifik Wiryani, SH.,M. Si., M. Hum.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **NOKA NOVITA**  
NIM : **201610380211002**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM PROSES PERADILAN PIDANA** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Oktober 2018  
Yang menyatakan,



**NOKA NOVITA**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahimi.*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM PROSES PERADILAN PIDANA”**.

Adapun maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya dengan ucapan *jazakumullah ahsanul jaza'* kepada:

1. Kedua orang tuaku bapak Agus Mujiono dan Ibu Robiah, yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Magister Hukum ini tepat waktu.
2. Bapak Drs. H. Fauzan, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Ahsanul In'am, Ph. D Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Mokh. Najih, Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum atas motivasi dan kemudahan pelayanan selama masa studi.
5. Bapak Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
6. Bapak Dr. Haris, SH, MH Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.



7. Semua dosen Magister Ilmu Hukum dan Staf Tata Usaha Program Pascasarjana yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan wawasan serta pelayanan akademik selama menyelesaikan program studi
8. Teman-teman MIH angkatan 2016, terimakasih telah menjadi teman yang menyenangkan selama 5 semester ini semoga bisa berteman selamanya amin.
9. Teman-teman MIH angkatan 2017, terutama mbak Bakti, SH telah menyemangati dan memotivasi penulis selama mengerjakan tesis ini
10. Member Trio Halu, Windha, SH dan Deby, SH, yang telah sabar mendengarkan, menyemangati dan memotivasi penulis selama menyelesaikan tesis ini.
11. Serta teman-teman pascasarjana dan pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan tesis ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 20 Desember 2018

Penulis

## ABSTRAK

**Noka Novita:** *Surat Keterangan Dokter Dalam Proses Peradilan Pidana*

Dalam karya ilmiah ini penulis akan mengkaji Apakah surat keterangan dokter dapat dijadikan alat bukti sebagai alasan penundaan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dan implikasi surat keterangan dokter yang terbukti palsu. Kejaksaaan dan pengadilan negeri kota malang sebagai lokasi penelitian. Penulis tertarik untuk meneliti tentang surat keterangan dokter karea surat keterangan dokter jarang diragukan oleh instasi jika digunakan untuk memminta dispensasi. Surat keterangan dokter memiliki kekuatan hukum karena merupakan keterangan ahli “seorang dokter diharuskan memberikan surat keterangan serta pendapatnya yang telah diperiksa sendiri” hal ini tertuang dalam pasal 7 kode etik kedokteran. Terbitnya surat keterangan sakit maka terdakwa yang dinyatakan sakit akan dianggap tidak layak untuk disidangkan atau unfit to stand trial lalu penegak hukum akan menunda proses peradilan, pengalihan penahanan, dan pembantaran. Surat keterangan harus dianggap asli dan harus diterima hakim dan jaksa sampai ada bukti sebaliknya. Jika keberadaan surat palsu tersebut atas kerjasama antara terdakwa, kuasa hukumnya dan dokter pribadinya maka untuk dokter dapat dikenakan sanksi pasal 267 KUHP tentang surat keterangan dokter palsu Untuk terdakwa dan kuasa hukumnya dapat dikenakan sanksi Pasal 221 KUHP menghalang-halangi penyidikan Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Metode penulisan dalam penulisan ini metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang diawali dari data sekunder sebagai data awal untuk kemudian digunakan dalam tahap berikutnya yaitu penelitian lapangan atau terhadap masyarakat. Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah jenis obervasi non partisipan dan observasi terstruktur, artinya penulis telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah.

Kata Kunci: Surat dokter, terdakwa ,*unfit/fit stand trial*

## ABSTRACT

**Noka Novita** :*Doctor certificate in the Criminal Justice Process*

In this paper the authors will examine Does the medical certificate may be used as evidence as the reason for the delay in prosecution and court, and the implications of a doctor's certificate that proved false. Judiciary in malang as a research location. Authors interested in researching on the medical certificate doctor's certificate karea rarely questioned by instasi if used for memminta dispensasi.Surat medical certificate has no legal force because it is a statement of the expert "a doctor is required to provide a written statement and his opinions have been examined myself" this is contained in article 7 of the code of medical ethics. The issuance of a certificate of ill defendant stated ill be deemed unfit to stand trial or unfit to stand trial and law enforcement will delay the judicial process, the transfer of detention, and pembantaran. The certificate must be considered to be original and must be received by judges and prosecutors until there is evidence to the contrary. If the existence of a fake letter that the cooperation between the defendant, lawyer and personal doctor then to the doctor may be penalized in Article 267 of the Criminal Code on the medical certificate false For accused and their legal representatives may be penalized Article 221 of the Criminal Code to obstruct the investigation Threatened with imprisonment nine months or a maximum fine of four thousand five hundred rupiah. The method of writing in this paper an empirical juridical approach initiated research of secondary data as initial data for later use in the next stage of the research field or to society. Observations made by the authors is the type of non-participant observation and structured observation, means the author has prepared the questions in accordance with the formulation of the problem.

Keywords: doctor certificate,defendant, unfit/fit to stand trial



## DAFTAR ISI

**Halaman Judul**

**Halaman Persetujuan**

**Susunan Dewan Penguji**

**Halaman Pernyataan**

**Kata Pengantar..... i**

**Abstraksi ..... iii**

**Abstract ..... iv**

**DAFTAR ISI..... v**

### **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 3

### **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Surat Keterangan Medis ..... 3

1. Pengertian Surat ..... 3

2. Pengertian Surat Keterangan Dokter ..... 3

B. Proses Perkara Pidana ..... 5

C. Penundaan Pemeriksaan Proses Peradilan ..... 4

D. Hak-hak Tersangka ..... 6

E. Sistem Pembuktian dan Rekam Medis

1. Teori Pembuktian ..... 7

2. Rekam Medis ..... 7

### **METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian Yang Digunakan ..... 8

B. Lokasi Penelitian ..... 8

C. Informan Penelitian ..... 9

D. Teknik Pengumpulan Data ..... 9

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |           |
|---|-----------|
| A. Surat Keterangan Dokter Dapat Dijadikan Alat Bukti Sebagai Alasan<br>Penundaan Pemeriksaan ..... | 10        |
| a. Status Hukum Bagi Terdakwa Yang Sakit.....   | 15        |
| b. Pertimbangan Jaksa Dan Hakim Memberikan Dispensasi .....   | 17        |
| B. Implikasi surat keterangan dokter yang terbukti palsu.....                                       | 20        |
| 1. Akibat Hukum Bagi Terdakwa.....  | 23        |
| 2. Jaksa Dan Hakim Menentukan Terdakwa Siap Diperiksa Atau Tidak .....                              | 26        |
| <b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>   |           |
| A. Kesimpulan.....  | 29        |
| B. Saran .....  | 30        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>31</b> |



## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peristiwa surat keterangan dokter palsu yang digunakan oleh terdakwa dalam proses peradilan yang terdakwanya merupakan pejabat pemerintah yaitu:

1. Miryam S Hariyani, mantan ketua DPR
2. Setya Novanto, ketua DPR
3. Ali Mudhori, anggota DPR
4. Abdulah Puteh, Gubernur Aceh
5. Budi Supriyanto, mantan komisi V DPR

Surat keterangan dokter memiliki kekuatan hukum karena merupakan keterangan ahli “seorang dokter diharuskan memberikan surat keterangan serta pendapatnya yang telah diperiksa sendiri” hal ini tertuang dalam pasal 7 kode etik kedokteran. Pasal tersebut diperkuat dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 35 bahwa “dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktek kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki salah satunya menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi”. Sehingga jarang ada instansi yang meragukan isi surat tersebut bahkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya diatur dalam satu pasal saja tetapi ada beberapa pasal yang mengatur, yaitu :

1. alat bukti yang sah menurut undang-undang salah satunya adalah surat (pasal 184 ayat (1) point c KUHAP)
2. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar pada keahlian mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dan diperkuat dengan sumpah (pasal 187 point c KUHAP)
3. Pasal mengenai pengertian keterangan ahli (Pasal 1 angka 28)
4. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. (Pasal 120 ayat (1) KUHAP)

5. Dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan tentang kejahatan terhadap tubuh seseorang, yang berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. (Pasal 133 (1) KUHAP)
6. Pasal 179 KUHAP berisi seorang ahli wajib memberikan keterangannya ketika diminta oleh pengadilan yang telah disumpah sebelumnya.

Surat keterangan dokter dapat memunculkan masalah hukum jika pasien yang menghendaki pembuatan surat tersebut berstatus sebagai pelaku tindak pidana atau saksi dari suatu peristiwa pidana. Masyarakat menganggap meminta dokter membuat surat keterangan sakit untuk alasan tidak hadir sering dianggap biasa atau wajar untuk dilakukan, dokter pribadi dapat dengan mudah memberikan surat keterangan tersebut karena kedekatannya dengan si pasien. Dari terbitnya surat keterangan sakit dan keadaan sakit terdakwa maka terdakwa yang dinyatakan sakit akan dianggap tidak layak untuk disidangkan atau *unfit to stand trial* lalu penegak hukum akan melakukan pembantaran proses peradilan pengaturan mengenai pembantaran terdapat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 1989 tentang Pembantaran (*stunting*) .Di Indonesia dalam KUHAP dan KUHP belum ada pengaturan secara jelas mengenai sehat atau sakit yang dapat di dengarkan keterangannya s.at berhadapan dengan proses peradilan<sup>1</sup>. Dalam ilmu kedokteran kehakiman hanya penjelasan mengenai pembuktian forensik, kejahatan terhadap nyawa dan tubuh. Padahal dalam tahapan-tahapan dan prosedur sidang perkara pidana tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ditetapkan dalam UU.No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana para penegak hukum selalu mengawali dengan memeriksa identitas terdakwa selanjutnya menanyakan keadaan terdakwa sehat Pengkajian lebih mendalam oleh para penegak hukum tentang penggunaan surat keterangan medis serta motif pelaku dan penasehat hukumnya menyalahgunakan surat tersebut dapat menjadi sanksi

---

<sup>1</sup> Kartono Muhamad. Surat Keterangan Dokter Tinjauan Dari Aspek Kedokteran. <https://www.academia.edu>. Diakses 14 Nov 2017 pukul 18.44 wib

tambahan selain sanksi pelanggaran yang dilakukan sebelumnya. Karena apabila dibiarkan akan ada kasus-kasus serupa yang berlanjut sehingga akan menimbulkan persoalan sosial.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan tersebut peneliti ingin membahas lebih lanjut dengan dalam tesis ini dengan judul **“Surat Keterangan Dokter Dalam Proses Peradilan Pidana”** dan dengan batasan masalah sesuai dengan rumusan masalah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah surat keterangan dokter dapat dijadikan alat bukti sebagai alasan penundaan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan?
2. Apakah implikasi hukum jika surat keterangan dokter tersebut terbukti palsu atau dipalsukan?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Surat Keterangan dokter**

#### **1. Pengertian Surat**

Surat<sup>2</sup> adalah alat komunikasi tertulis yang berguna untuk bertukar informasi antara pihak satu ke pihak yang lain. Informasi dari surat tersebut dapat berupa: perintah, pernyataan, pemberitahuan, permohonan, alat bukti, dan laporan.

Dalam hal ini surat keterangan dokter merupakan surat pemberitahuan untuk memberi tahu bahwa tersangka tidak dapat melaksanakan proses pemeriksaan karena sakit sekaligus alat bukti karena berisi diagnosa dokter tentang jenis tindakan yang harus dijalani oleh terdakwa.

#### **2. Pengertian Surat Keterangan Dokter**

Surat keterangan dokter adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter untuk tujuan tertentu tentang kesehatan atau penyakit pasien atas permintaan pasien atau atas permintaan pihak ketiga dengan persetujuan pasien ketentuan

---

<sup>2</sup> Id.m. Wikipedia.org diakses 2 agustus 2018 pukul 13.00

yang telah diatur undang-undang. Pembuatan surat keterangan medis harus berdasarkan hasil pemeriksaan, dan dokter pembuatnya harus mampu membuktikan kebenaran keterangannya apabila diminta. Dalam kode etik kedokteran Indonesia Kode etik kedokteran Indonesia (pasal 7) mengatur sebagai berikut : ” seorang dokter harus memberi keterangan sesuai dengan hasil yg diperiksanya sendiri”

Seorang dokter melakukan pemeriksaan fisik dan Tanya jawab tentang apa yg dirasakan terhadap pasiennya, sebelum memberikan diagnosa dan cara tindakan penyembuhannya. Jadi dokter tidak asal-asalan membuat surat karena” dokter atau dokter gigi yang mempunyai surat tanda registrasi memiliki kewenangan berpraktek kedokteran sesuai keilmuan dan kemampuan yang dimiliki salah satunya membuat surat keterangan dokter atau dokterd gigi” tertuang di dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 point 8 tentang Praktik Kedokteran. bentuk macam-macam surat keterangan berdasarkan kepentingannya macam-macam bentuk surat keterangan berdasarkan kepentingannya, yaitu:<sup>3</sup>

- 1) Surat sakit, untuk kepentingan tidak hadir dalam ujian, bekerja atau sekolah, dan dalam proses peradilan.
- 2) Surat sehat, untuk melamar pekerjaan, asuransi
- 3) Surat keterangan kelahiran, untuk kepentingan pendataan bayi berisi kapan dilahirkan dan nama orangtuanya.
- 4) Surat kematian, untuk pendataan pasien yang meninggal dirumahsakit.
- 5) *Visum et ripertum* demi kepentingan peradilan, dibuat atas permintaan penyidik untuk membuat terang suatu perkara.

Surat keterangan dokter secara formal merupakan segala sesuatu yg erat kaitannya dengan pembuatan surat tersebut dan secara materiil segala sesuatu yang berhubungan dengan penjelasan isi dari surat tersebut.

### **C. Penundaan Pemeriksaan Proses Peradilan**

Pada dasarnya, penundaan pemeriksaan di sidang dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Kick andry. Macam-macam Surat keterangan dokter.[http // www.scribd.com](http://www.scribd.com). diakses 14 Nov 2017 pukul 19.00



1. Dalam hal terdakwa tidak hadir padahal telah dipanggil (baik secara sah maupun tidak sah) tertuang dalam Pasal 154 ayat (3) KUHP

M. Yahya Harahap<sup>4</sup> mengungkapkan tidak dibenarkan proses peradilan *in absentia* dalam tahap pemeriksaan biasa maupun. Ketidakhadiran tersangka pada proses persidangan seharusnya pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan. Maka dijelaskan dalam pasal 154 KUHP prosedur pemanggilan terdakwa dalam proses persidangan. Pengaturan dalam pasal tersebut menunjuk ketidakhadiran terdakwa dalam sidang membuat pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan. Tetapi perlu diingat bahwa ini berlaku dalam hal hanya ada satu orang terdakwa. Jika ada lebih dari satu orang terdakwa, pemeriksaan sidang dapat dilangsungkan terhadap terdakwa yang hadir.

2. Dalam acara pemeriksaan singkat, untuk kepentingan pembelaan terdakwa, diatur dalam Pasal 203 ayat (3) huruf c KUHP: “guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari.”

3. Gugurnya Kewenangan Menuntut.

Beberapa hal yang menjadi dasar atas gugurnya kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan menurut KUHP adalah :

- a. Tidak adanya pengaduan dalam hal delik aduan (pasal 72-75 KUHP)
- b. *Ne bis in idem* (pasal 76 KUHP)
- c. Matinya terdakwa (pasal 77 KUHP)
- d. Daluwarsa (pasal 78 KUHP)
- e. Telah ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja (pasal 82 KUHP).

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. 2008. hlm. 111

Sementara ketentuan diluar KUHP adalah Abolisi, Amnesti,dan Delik Aduan.

7. suatu perbuatan yang telah dituntut untuk kedua kali artinya perbuatan tersebut sudah pernah dilakukan (terulang) dan sebelumnya sudah pernah di putus dipengadilan.
8. matinya terdakwa (pasal 77) dan matinya terpidana (pasal 83)

Dalam KUHPidana tidak istilah pertanggungjawaban hukum dapat diwariskan. Sehingga berdampak pada gugurnya tuntutan seorang jaksa apabila tersangka atau terdakwa mati, beban pertanggungjawaban hukum terpidana menjadi terhapus.

9. Daluwarsa Penuntutan.
10. Tenggang Waktu Daluwarsa Penuntutan. Tenggang waktu daluarsa tertuang dalam pasal 78 (1) KUHP

#### **D. Hak-Hak Tersangka**

Terdakwa adalah seorang tersangka yang karena perbuatannya sehingga harus mengikuti proses peradilan dari penuntutan, pemeriksaan dan diadili dalam proses persidangan( pasal 1 butir 15 KUHP )

Pada pasal 58 merupakan salah satu hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dokter bagi terdakwa yang ditahan dan point 7 hak untuk menghubungi kuasa hukumnya, apabila hak ini digunakan oleh terdakwa tanpa adanya pengawasan dikhawatirkan memunculkan peluang kecurangan dalam proses peradilan. Dokter yang dihubungi oleh terdakwa biasanya adalah dokter pribadi bukan dokter dari pihak rutan yang rentan mendapatkan intimidasi dan tekanan dari terdakwa maupun kuasa hukumnya untuk merekayasa surat keterangan dokter guna meringankan hukuman atau untuk mengulur proses peradilan.

## **F. Sistem Pembuktian dan Rekam Medis**

### **1. Sistem Pembuktian**

Sistem pembuktian di Indonesia diatur dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Ketentuan tersebut hampir sama dengan bunyi pasal 6 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu “ tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Dua alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, dan petunjuk.

Apabila telah terpenuhi minimal dua alat bukti yang sah atas kesalahan yang dibuat tersangka maka hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa telah benar-benar telah bersalah dan terbukti secara materiil melakukan tindakan pidana. Akan tetapi jika akhirnya dalam pembuktian tidak ditemukan alat bukti atau kurang dari dua alat bukti maka keyakinan hakim terdakwa tidak terbukti bersalah.

### **2. Rekam Medis**

Sesuai yang tertuang dalam Permenkes RI No.749a/Menkes/PER/XII/1989 disebutkan bahwa:”Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan”. Menurut Pasal 46 Undang-undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Pradoks): “rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”. Dijelaskan lebih lanjut dalam surat keputusandirektorat jenderal pelayanan medik No. 78 tahun 1991 tentang penyelenggaraan rekam medis

merekam hasilnya rekaman di rumah sakit, bahwa "rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada seorang pasien selama dirawat di rumah sakit yang dilakukan di unit-unit rawat jalan termasuk di unit gawat darurat dan unit unit rawat inap".

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian Yang Digunakan**

Soejono soekanto<sup>5</sup> mengungkapkan bahwa metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang diawali dari data sekunder sebagai data awal untuk kemudian digunakan dalam tahap berikutnya yaitu penelitian lapangan atau terhadap masyarakat. Sehingga penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, yaitu penulis akan melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yakni mengenai "Surat Keterangan Dokter Dalam Proses Peradilan Pidana". Artinya penulis memadukan antara konsep teori atau peraturan perundang-undangan serta penerapannya di lapangan tentang surat keterangan dokter yang digunakan terdakwa untuk tidak hadir dalam proses peradilan pidana.

### **B. Lokasi Penelitian**

Nasution mengungkapkan<sup>6</sup>, lokasi penelitian adalah sebuah tempat yang dapat menjelaskan mengenai lokasi sosial yang didalamnya terdapat beberapa unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi untuk membantu peneliti menyelesaikan permasalahan. Dalam penelitian ini penulis memilih Pengadilan Negeri kota Malang dan Kejaksaan Negeri Kota Malang. Penulis memilih Pengadilan dan kejaksaan Negeri Kota Malang dengan pertimbangan, karena Kota Malang merupakan salah satu kota pendidikan dengan perkembangan yang cukup pesat pada bidang ekonomi dan pembangunan.

---

<sup>5</sup> Soejono soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui-pres. Jakarta. Hal 52

<sup>6</sup> Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta. PT. Bumi Aksara. Hal. 43

### C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi mengenai latar belakang penelitian<sup>7</sup>. Jadi informan adalah orang yang oleh peneliti dipilih menjadi narasumber karena dianggap berkompetensi atau berpengalaman terkait permasalahan peneliti. Dalam penulisan ini, penelitian mewawancarai bapak Djuanto, SH.MH dan bapak Benny Sudarsono S.H, M.H selaku hakim di pengadilan negeri malang dan Hasil wawancara serta bapak Novardi Andra ,SH. M.H, selaku kepala seksi pidana umum dan bapak Moch. Heri, S.H selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Malang

### D. Tehnik Pengumpulan Data

#### 1) Wawancara langsung

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Saat wawancara sedang berlangsung peneliti akan mengungkapkan masalah-masalah berupa pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya akan informan yang telah disebutkn diatas

#### 2) Observasi

Proses observasi bergerak melalui rangkaian aktivitas bervariasi, dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan situasionalnya<sup>8</sup>. Menurut anwar sutoyo<sup>9</sup> berdasarkan jenisnya observasi dibedakan menjadi empat macam yaitu:

1. Observasi partisipan, observer atau peneliti aktif ambil bagian dalam kehidupan orang yang diteliti.

---

<sup>7</sup> Moleong L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya. Hal 97

<sup>8</sup> hasyim hasanah “teknik-teknik observasi (sebuah alternative metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosiaol), dalam jurnal at-taqaddum, vol 8, no 1, juli 2016, hlm 31

<sup>9</sup> Anwar Sutoyo.2009. *Pemahaman Individu, Observasi,checklist, Interviu, kuesioner, dan Sosiometri*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 87

2. Observer non partisipan, peneliti tidak terlibat aktif hanya sebagai pengamat.
3. Observasi terstruktur, peneliti telah menyiapkan materi observasi terlebih dahulu yang sesuai dengan rumusan masalah dan batasan masalah.
4. Observasi tidak terstruktur, peneliti tidak mempersiapkan secara khusus batasan dalam penelitian karena belum mengetahui keadaan lapangan.

Dari keempat jenis observasi tersebut, penulis menggunakan jenis observasi non partisipan dan observasi terstruktur, artinya penulis telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah dan batasan masalah yang akan diteliti, akan tetapi penulis tidak terlibat dalam lingkungan sosial yang akan diteliti sehingga penulis membutuhkan informan yang telah disebutkan pada poin informan diatas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Surat Keterangan Dokter Dapat Dijadikan Alat Bukti Sebagai Alasan**

#### **Penundaan Pemeriksaan**

Surat keterangan dokter yang menyatakan terdakwa dalam keadaan kurang sehat dan membutuhkan perawatan dokter dapat dijadikan sebagai alasan terdakwa tidak hadir dalam persidangan sehingga proses hukum terdakwa di tunda bahkan di bantarkan sampai terdakwa dinyatakan sehat. Bapak Novardi Andara<sup>10</sup> mengungkapkan ”pertanyaan mengenai kesehatan terdakwa tersebut merupakan pertanyaan tambahan atau pertanyaan permulaan dalam pemeriksaan”. Di dalam Pasal 50 ayat KUHAP tertulis: “Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum”.

Makna segera di dalam pasal 50 KUHAP memiliki sifat fleksibel dalam penerapannya, sering kali dalam perkara dengan tingkat pembuktian yang rumit

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan bapak Novardi Andra ,SH. M.H, selaku kepala seksi pidana umum di Kejaksaan negeri malang, pada hari kamis 30 Agustus 2018



harus dilakukan berulang kali untuk memperkuat pembuktian. Disamping itu juga untuk menghindari status perkara terdakwa menjadi menggantung yang berakibat pada kepastian hukum terdakwa yang tidak tercapai.

Menurut penulis telah terjadi penyimpangan jika dikaitkan dengan pertanyaan permulaan yang diucapkan hakim dan jaksa dalam pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sakit atau tidak. Apabila tindakan tersebut untuk memenuhi salah asas “cepat” dalam sistem peradilan di Indonesia, setiap tahap pemeriksaan perkara memiliki masa perpanjangan demi kepentingan pemeriksaan. Adanya perpanjangan sebagai antisipasi jika dalam berjalannya proses pemeriksaan terdakwa sakit atau jaksa dan hakim dihadapkan pada perkara dengan pembuktian yang sulit atau alasan lain.

Selama penahanan berlangsung tersangka memiliki hak-hak yang dapat digunakan antara lain yang tertulis dalam pasal 58 KUHAP yang menyatakan bahwa terdakwa yang sedang ditahan berhak untuk menghubungi dokter, pasal 57 KUHAP menyatakan bahwa tersangka bebas menghubungi kuasa hukumnya. Pasal 71 KUHAP menjelaskan penuntut umum diizinkan mengawasi terdakwa dan pensihat hukumnya dari kejauhan tanpa mengetahui atau mendengar isi pembincaraan tersebut. Membatasi ruang gerak antara terdakwa dan pensihat hukum adalah perbuatan yang dilarang bagi penuntut umum sampai perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan<sup>11</sup>.

Banyaknya peraturan tentang perlindungan hak-hak terdakwa dan kewajiban hakim serta jaksa memenuhi hak tersebut, menjadikan peraturan itu sebagai peluang untuk menyusun rencana memanipulasi keadaan agar dapat menunda proses pemeriksaan atau mendapatkan hukuman paling ringan bahkan bebas. Rencana tersebut tidak akan dianggap melanggar peraturan karena dibuat berdasarkan hak terdakwa dan sesuai mekanisme yangizinkan undang-undang. Disini pemahaman jaksa dan hakim dalam memberikan hak terdakwa selama

---

<sup>11</sup> Lamintang-Theo lamintang. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*. 2010. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 201

proses pemeriksaan yang diatur dalam KUHAP harus diberikan tetapi dilihat dasarnya atau alasan terdakwa menggunakan hak-haknya. Pemenuhan hak terdakwa yang salah atau tidak sesuai kenyataan akan berakibat pada kepastian hukum bagi terdakwa dan penegakan hukum tidak dapat tercapai.

Di dalam proses penyidikan oleh jaksa dan pemeriksaan di pengadilan oleh hakim terdakwa tidak selalu harus ditahan atau dapat juga meminta penangguhan penahanan kepada jaksa penuntut umum atau hakim, yang dapat dibuat sendiri atau oleh kuasa hukumnya. Sehingga status tahanan terdakwa masih sah dan berlaku hanya saja pelaksanaan penahanan yang dihentikan dengan terdakwa keluar dari tahanan<sup>12</sup>.

*Unfit to stand trial* atau yang biasa disebut terdakwa tidak layak untuk menjalani persidangan<sup>13</sup>. Sehingga mengharuskan jaksa dan hakim menunggu terdakwa sehat secara psikis dan psikologis untuk dapat dilakukan pemeriksaan. Perkara dengan terdakwa berstatus *unfit to stand trial* adalah perkara korupsi dengan terdakwa mantan presiden republik Indonesia (alm) Soeharto, yang berakibat pada hakim membuat penetapan pengembalian berkas perkara kepada jaksa penuntut umum karena tidak layak untuk diperiksa dalam sidang. Berdasarkan penetapan yang diberikan oleh hakim jaksa membuat Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3).

Apabila terdakwa sakit sehingga tidak dapat menjalani penahanan maka dapat meminta penangguhan penahanan kepada hakim atau jaksa yang memeriksa dengan menunjukan surat dokter sebagai alasan permohonan penangguhan penahan<sup>14</sup>. Sebaliknya jika terdakwa yang telah mendapatkan penangguhan penahanan kemudian sakit dalam masa penangguhan penahanan melihat pasal 22 KUHAP maka selama sakit akan terhitung sebagai penahanan

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan bapak Novardi Andra ,SH. M.H, selaku kepala seksi pidana umum di kejaksaan negeri malang, pada hari kamis 30 Agustus 2018

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak Benny Sudarsono, SH, MH selaku hakim di pengadilan negeri malang pada hari senin 3 agustus 2018

<sup>14</sup> *IBID*

yang berakibat pada pengurangan hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh hakim. Meskipun didalam putusan harus berisi pemidanaan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf (k) “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”. Tetapi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Perintah Agar Terdakwa Ditahan Menurut Pasal 197 Ayat (1) Huruf K KUHAP menjelaskan “apabila wewenang penahanan yang dimiliki pengadilan Negeri/pengadilan tinggi sudah habis dipergunakan, maka hakim Pengadilan Negeri/Tinggi tidak dapat memerintahkan agar terdakwa ditahan, dalam putusannya”.

Isi putusan dalam SEMA tersebut memberi keuntungan bagi terdakwa dan penasihat hukum untuk mengupayakan hukuman yang paling ringan bahkan bebas. Jika barang bukti sudah diamankan oleh penyidik serta permohonan penangguhan penahanan disetujui oleh jaksa, kemudian terdakwa sakit selama masa penangguhan hingga habis masa penahanan maka ketika putusan hakim dengan pidana sesuai dengan waktu terdakwa ditahan maka terdakwa akan dibebaskan atau dikurangkan dengan masa terdakwa sakit saat penangguhan penahanan. Perbuatan ini juga bukan merupakan pelanggaran karena setiap prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peristiwa ini terjadi adanya tumpang tindih peraturan yang semakin memberikan ruang bagi terdakwa menghindari bahkan terbebas dari proses peradilan bukan semakin memperberat hukumannya.

Surat keterangan sakit yang dibuat oleh dokter dapat menunda proses persidangan padahal didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur ketentuan tersebut, akan tetapi di tertulis dalam pasal 44 ayat (1) KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungggkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Dengan adanya pengaturan yang terdapat dalam pasal 44 ayat (1) KUHP dan pelaksanaanya yang tidak diatur secara jelas didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

menjadi peluang bagi terdakwa dan kuasa hukumnya untuk memnunda proses pemeriksaan di tingkat penuntutan dengan jalan pengajuan permohonan penangguhan penahanan menjadi tahanan kota atau pembantaran untuk mendapatkan perawatan dokter di luar rutan yang menjadikan tenggang waktu penahanan habis sehingga terdakwa harus dibebaskan demi hukum. Hal ini sesuai dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pemantaran (Stuiting) Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa Yang Dirawat Nginap Dirumah Sakit Diluar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi Yang Berwenang Menahan point 2 yaitu “akhir-akhir ini sering terjadi terdakwa yang berada dalam rumah tahanan negara mendapat izin untuk dirawat-nginap dirumah sakit diluar Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang kadang-kadang perawatannya memakan waktu lama sehingga tidak jarang terjadi terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum karena tenggang waktu untuk menahan telah habis”.

Apabila yang telah tertulis pada point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pemantaran (Stuiting) Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa Yang Dirawat Nginap Dirumah Sakit Diluar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi Yang Berwenang Menahan diatas benar terjadi pada terdakwa yang mengajukan permohonan tentu akan menguntungkan terdakwa, akan tetapi kepastian hukum dan keadilan tidak dapat tercapai.

*Unfit to stand trial* atau yang biasa disebut terdakwa tidak layak untuk menjalani persidangan<sup>15</sup>. Sehingga mengharuskan jaksa dan hakim menunggu terdakwa sehat secara psikis dan psikologis untuk dapat dilakukan pemeriksaan. Perkara dengan terdakwa berstatus *unfit to stand trial* adalah perkara korupsi dengan terdakwa mantan presiden republik Indonesia (alm) Soeharto, yang berakibat pada hakim membuat penetapan pengembalian berkas perkara kepada jaksa penuntut umum karena tidak layak untuk diperiksa dalam sidang.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan bapak Benny Sudarsono, SH, MH selaku hakim di pengadilan negeri malang pada hari senin 3 agustus 2018

Berdasarkan penetapan yang diberikan oleh hakim jaksa membuat Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara(SKP3).

**a. Status Hukum Bagi Terdakwa Yang Sakit**

Jika terdakwa sakit selama proses penahanan membutuhkan perawatan dokter yang akan berakibat pada penundaan tuntutan maka jangka waktu penahan dapat diperpanjang sesuai yang tertuang dalam pasal 29 ayat (1) KUHAP,

Guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat dokter, atau
- b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara Sembilan tahun atau lebih.

Apabila terdakwa sakit dapat melakukan penangguhan penahanan namun untuk terdakwa yang memiliki sakit permanen sehingga membutuhkan perawatan intensif dari dokter sehingga tidak dapat hadir terus menerus dan dalam proses peradilan Hakim atau jaksa tidak boleh memeriksa terdakwa yang sakit maka akan di lakukan pembantaran atau dihentikan sementara ini untuk menghindari habisnya masa penahana yaitu 90 hari jika lebih dari itu maka terdakwa harus dikeluarkan demi hukum(pasal 26 ayat (4) KUHAP)<sup>16</sup>.

Terdakwa yang sakit dapat menggunakan hak-haknya yaitu mendapatkan perawatan dirumah sakit pengalihan penahanan hingga pembantaran sehingga terdakwa tidak perlu berada didalam tahanan. Tetapi itu hanya bersifat sementara proses pemeriksaan oleh hakim dan penuntutan oleh jaksa hanya menunda proses pemeriksaan saja yang akan berlanjut ketika terdakwa dinyatakan sehat. Kecuali ada bukti yang kuat yang dapat meyakinkan hakim untuk menetapkan berkas perkara terdakwa dikembalikan kepada penuntut umum karena alasan sakit permanen.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan bapak Djuanto, SH.MH selaku hakim di pengadilan negeri malang pada hari senin 3 agustus 2018

Dijelaskan dalam asas legalitas yang dianut oleh jaksa yaitu jaksa diharuskan menuntut siapa saja yang melakukan tindak pidana tanpa perlu melihat akibat yang akan ditimbulkan Atau dengan kata lain setiap perkara pidana yang telah cukup bukti maka jaksa wajib menuntutnya sehingga tidak ada istilah seseorang luput dari tuntutan pidana hanya karena sakit atau apapun, gugurnya penuntutan terjadi karena tiga hal yaitu terdakwa meninggal, perkara yang telah kadaluarsa dan *nebis in idem* yaitu perkara yang telah diputus oleh hakim<sup>17</sup>.

Asas praduga tidak bersalah yang dianut jaksa dalam berpekerja mengharuskan jaksa mempunyai alat bukti minimum yaitu dua alat bukti harus terpenuhi sebagai dasar tuntutan di muka persidangan bahwa seseorang telah melakukan tindakan pidana. Asas ini menjadi pengendali jaksa agar tidak sewenang-wenang dalam memberikan tuntutan. Terpenuhinya dua alat bukti permulaan yang cukup seseorang diduga telah melakukan tindak pidana maka jaksa akan membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), untuk memudahkan saat penyidikan biasanya dilakukan penahanan di Rutan. Didalam penyidikan oleh jaksa penuntut dikenal adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jaksa tidak dapat memutuskan penghentian penuntutan tanpa melihat alasan-alasan hukum yang kuat sebagai dasar penghentian yaitu<sup>18</sup>:

- a. Tidak cukup bukti Pasal 140 ayat (2) KUHP
- b. Seseorang tidak boleh dituntut kedua kalinya dengan perbuatan yang sama yang telah diputus oleh hakim (pasal 76 KUHP).
- c. Kewenangan menuntut hilang jika terdakwa meninggal dunia (pasal 77 KUHP).
- d. Kadaluarsa yaitu masa waktu tenggang penuntutan telah habis (pasal 78 KUHP ).

---

<sup>17</sup> *IBID*

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 437



Menjadikan kadaluarsa suatu kasus merupakan satu-satunya upaya yang dapat dilakukan terdakwa untuk membuat masa tenggang penuntutan habis sehingga harus dibebaskan demi hukum. Membuat kasus menjadi kadaluarsa memerlukan waktu yang tidak singkat bahkan bertahun sehingga kurang efektif dan jarang digunakan terdakwa sebagai alternative menghindari proses peradilan. Kemungkinan terdakwa akan merasa tersiksa dan tertekan harus bersembunyi selama itu. Kasus yang telah kadaluarsa juga tidak bisa dilakukan penuntutan atau penerapan pemidanaan atas putusan hakim ketika terdakwa ditemukan, karena membuat kasus menjadi kadaluarsa memerlukan waktu lama sehingga itu sudah dianggap sebagai hukuman bagi terdakwa. Dalam perkara yg kadaluarsa hukum memang sudah tidak dapat di tegakkan lagi.

#### **b. Pertimbangan Jaksa Dan Hakim Memberikan Dispensasi**

Meski memiliki nilai pembuktian bebas hakim atau jaksa harus mempercayai bahwa diagnosa dokter atas terdakwa adalah benar adanya sesuai apa tertulis dalam surat keterangan dokter tersebut, kecuali telah menemukan bukti-bukti lain yang menyatakan sebaliknya. Keterangan dokter tersebut dipercayai oleh hakim dan jaksa karena merupakan pendapat ahli yang harus diterima analisisnya. Disini hakim dan jaksa merupakan orang yang awam terhadap ilmu kesehatan sehingga memerlukan pendapat ahli untuk mendapatkan keyakinan terkait kesehatan terdakwa. Tetapi mempercayai isi surat keterangan dokter bukan berarti terdakwa bisa langsung mendapatkan dispensasi dalam proses peradilan. Diberikannya dispensasasi berupa penundaan, pengalihan penahanan hingga pembantaran merupakan wewenang jaksa dan hakim.

Pasal 7 KODEKI seringkali disalah gunakan oleh oknum dokter pribadi untuk membuat atau merekayasa keadaan kesehatan pasien sehingga terdakwa mendapatkan dispensasi dari hakim dan jaksa berupa penundaan putusan dan tuntutan, pengalihan penahanan, perpanjangan masa tahanan hingga pembantaran. Dokter membuat surat keterangan dokter palsu dengan dasar alasan kemanusiaan,

“Kemampuan seseorang mempertanggungjawabkan kesalahan merupakan masalah yuridis sedangkan orang yang terganggu kesehatannya adalah masalah medis”<sup>19</sup>. Jadi tidak bisa seseorang dituntut atau memepertanggung jawabkan perbuatannya ketika masih terganggu kesehatannya harus menunggu sampai terdakwa sembuh. Upaya yang dilakukan hakim dan jaksa adalah menjadikannya tahanan kota, memperpanjang masa penahanan hingga pembantaran untuk menghindari masa penahanan habis.

Dalam memberikan dispensasi berupa penundaan persidangan atau penuntutan, penangguhan penahanan, perpanjangan masa tahanan dan pembantaran surat keterangan dokter sangat membantu jaksa dan hakim untuk mempertimbangkan tindakan tersebut layak diberikan kepada terdakwa atau tidak. Tidak semua surat keterangan dokter dapat diterima oleh hakim dan jaksa akan tetapi surat dokter dapat menjadi pertimbangan adalah surat dokter yang dilengkapi dengan rekam medis “medical record” atau surat keterangan dokter yang dibuat oleh dokter lepas<sup>20</sup>. Dasar pertimbangan jaksa disini telah terpenuhi yaitu

1. Surat rekam medis tersebut dibuat oleh dokter
2. Dalam sumpah jabatannya
3. Berisi pendapat ahli berdasarkan keahliannya (diagnosa penyakit pasien)
4. Diminta secara resmi

Penulis sependapat dengan bapak Novardi karena dokter berkerja dan mendapatkan upah atas jasa yang diberikan kepada pasien, sehingga memungkinkan dokter akan berbuat apasaja demi menyenangkan pasien dan mendapatkan imbalan yang besar termasuk memperjual-belikan diagnosa palsu. Maksudnya adalah diagnosa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya apalagi dokter pribadi yang sudah cukup lama mengenal pasiennya pasti memiliki kedekatan psikologis sehingga susah untuk menolak permintaan pasien sekalipun

---

<sup>19</sup> Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Malang. UMM Press. Hal 232

<sup>20</sup> *Op.Cit.* Hasil wawancara dengan bapak Novardi Andra ,SH. M.H

melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman saat bekerja. *Second opinion* atau pendapat lain dari dokter yang disediakan sendiri oleh jaksa atau hakim dapat menjadi bahan perbandingan untuk menguatkan penilaian terhadap surat keterangan dokter yang dibawa oleh terdakwa.

Akan tetapi hal berbeda diungkapkan oleh bapak Djuanto, beliau mengatakan bahwa:

Surat dokter yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit wajib dipercayai oleh hakim baik itu dibuat oleh dokter pribadi atau dokter lapas. Karena dokter memeriksa pasien sampai menerbitkan surat keterangan itu dibatasi kode etik kedokteran dan dibawah sumpah jabatannya. Tetapi jika surat dokter dipakai lebih dari 3 kali(karena jarang terdakwa memakai surat dokter berkali-kali) maka hakim akan memerintahkan jaksa penuntut untuk membuktikan kebenaran bahwa terdakwa benar-benar sakit maka harus ditunggu sampai terdakwa sehat. Jika kenyataan sebaliknya maka hakim akan memerintahkan kepada jaksa untuk menghadirkan terdakwa secara paksa<sup>21</sup>.

Jika harus menunggu sampai lebih dari tiga kali penggunaan surat keterangan dokter, seperti yang diungkapkan bapak djuanto diatas tentu terdakwa sudah banyak mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan dengan alasan sakit padahal kenyataan sebaliknya yang akan berakibat pada penumpukan perkara pada tingkat penuntutan dan persidangan. Sehingga menurut penulis kurang efektif untuk diterapkan seharusnya dari awal terdakwa mengajukan surat keterangan dokter sudah ada *second opinion* dari dokter yang disedian hakim dan jaksa sehingga pemberian dispensasi untuk terdakwa yang sakit memang layak diberikan.

Bagi hakim dan jaksa pernyataan seorang dokter yang tertulis didalam surat keterangan dokter atau rekam medis merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum. Proses pemeriksaan pasien, menganalisa hingga menentukan jenis perawatan berdasarkan keilmuan yang dimiliki tentu akan memiliki akibat hukum bagi pasiennya yang berstatus sebagai terdakwa. Karena di

---

<sup>21</sup> *Op.cit.* Hasil wawancara dengan bapak Djuanto, SH.MH

dalamnya memiliki kekuatan hukum yang dapat memberikan dispensasi terdakwa tidak hadir dalam persidangan atau penuntutan oleh jaksa, mendapatkan penangguhan penahanan, pembantaran, atau bahkan penundaan pemeriksaan sampai terdakwa dinyatakan sehat.

Menurut sidik sunaryo<sup>22</sup> “masalah tersebut perlu adanya peraturan kode etik yang memiliki sangsi pidana agar dalam penegakannya memiliki sifat memaksa”. Karena memberikan dispensasi saat proses peradilan yang dilakukan jaksa dan hakim kepada terdakwa yang alasan permohonan tidak sesuai kenyataan merupakan pelanggaran kode etik. Tetapi selama ini tidak ada sanksi bagi jaksa atau hakim jika diketahui memberikan dispensasi kepada terdakwa sakit padahal kenyataan sebaliknya.

Menurut hemat penulis merekonstruksi perkara yang sudah berwujud berkas belum tentu bukan hal yang sederhana untuk mendapatkan peristiwa hukum yang sempurna, disamping itu jaksa dan hakim tidak pernah terlibat langsung dalam pengumpulan bukti-bukti perkara pidana. Sehingga rawan di gunakan oleh terdakwa memberikan lampiran surat dokter dengan diagnosa palsu. Kenyataannya hakim dan jaksa seringkali memberikan dispensasi hingga pembantaran bagi terdakwa yang sakit. Tindakan tersebut terjadi kemungkinan karena tidak ada sanksi yang harus diterima jaksa dan hakim jika memberikan dispensasi hingga pembantaran karena surat keterangan dokter yang diketahui palsu dikemudian hari.

## **B. Implikasi surat keterangan dokter yang terbukti palsu**

Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum akan berakibat pada putusan hakim dan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa<sup>23</sup>. Ketika penuntut umum berpendapat bahwa suatu perkara layak di limpahkan kepengadilan maka surat dakwaan harus segera dibuat oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan

---

<sup>22</sup> Sidik Sunaryo. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. 2004. UMM Press. Malang. Hal. 168

<sup>23</sup> P..A. F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Dan YurisPrudensi*. Sinar grafika. Jakarta. Hal 304

ketentuan pasal 140 ayat (1) KUHP yaitu: dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Dalam hasil wawancara dengan Jaksa penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Malang, bapak Moch. Heri, SH menuturkan<sup>24</sup>:

“Nilai pembuktian surat bukan akta tidak sekuat ketika surat sebagai alat bukti, nilai pembuktiannya bebas tidak terikat. Jaksa tidak harus mempercayai secara mutlak keberadaan surat keterangan dokter yang diberikan terdakwa. Sehingga jaksa berhak memberikan dispensasi, pembantaran atau penangguhan penahanan atau tidak. Akan tetapi jika jaksa menduga surat keterangan sakit yang dibuat dokter itu palsu maka harus dibuktikan selama tidak di buktikan maka tidak bisa surat tersebut diduga palsu.

Hukum pidana di Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah, artinya seseorang tidak dapat dikatakan bersalah apabila belum mendapat putusan dari pengadilan. Tidak mudah menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana meskipun banyak pihak yang menyatakan bersalah, tetapi hakim dan jaksa harus ada bukti-bukti yang kuat yang mendasari tuduhan tersebut.

Asas praduga tidak bersalah memiliki kelebihan dan kekurangan, misalnya dalam kasus surat keterangan dokter yang berisi diagnosa palsu asas praduga tidak bersalah membuat ruang gerak jaksa dan hakim terbatas karena disini hakim dan jaksa selain menangani perkara yang telah dilakukan terdakwa sebelumnya, diwaktu yang bersamaan juga harus membuktikan terdakwa menggunakan surat dokter yang berisi informasi kesehatan palsu. Disamping itu asas ini untuk melindungi dari asal menahan atau salah tangkap seseorang tanpa adanya bukti yang cukup dan untuk melindungi kesewenangan dari aparat penegak hukum.

Alat bukti merupakan bagian terpenting dalam hukum acara di Indonesia karena yang dicari selama proses peradilan adalah kebenaran materiil yaitu kebenaran sesungguhnya, sebelum melakukan penahanan dan penuntutan harus

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan bapak Moch. Heri ,SH, selaku jaksadi kejaksaan negeri malang, pada hari kamis 30 Agustus 2018

memiliki minimal dua alat bukti. Alat bukti memberikan pengaruh besar bagi keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Jika dalam proses persidangan hakim memiliki firasat atau dugaan surat yang digunakan terdakwa palsu maka “hakim akan memerintahkan kepada jaksa penuntut umum(karena menghadirkan terdakwa di muka hakim adalah wewenang jaksa penuntut) untuk menyelidiki kebenaran keadaan terdakwa sebenarnya jika terbukti tidak sakit, maka hakim akan meminta jaksa untuk menghadirkan terdakwa secara paksa dan memeriksa ulang kesehatan terdakwa oleh dokter yang disediakan oleh hakim atau jaksa (biasanya dokter lapas) <sup>25</sup>“.

Pemeriksaan ulang kesehatan terdakwa oleh dokter yang berbeda yaitu dokter yang disediakan jaksa dan hakim tersebut dibenarkan demi mendapatkan kebenaran materiil sesuai dengan pasal 180 ayat (1) KUHP yaitu : “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Berkepentingan dimaksud adalah jaksa penuntut umum sesuai tugasnya yaitu menghadirkan terdakwa di muka persidangan.

Pengakuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak bisa dinilai kebenarannya secara sempurna, jaksa dan hakim harus tetap melakukan pemeriksaan pembuktian<sup>26</sup>. Jadi pengakuan dari tersangka atau terdakwa tidak dapat menghapus kewajiban pembuktian. Karena dianggap bukan merupakan bukti kebenaran sebenarnya. Maka dapat dilaporkan secara terpisah dengan tuduhan surat keterangan dokter palsu diatur dalam pasal 267 KUHP ayat (1) “ seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Pengawasan dokter yang masih lemah ditambah

---

<sup>25</sup> *IBID*

<sup>26</sup> Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan sidang pengadilan, Bandung, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali. 2012. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 275



dengan asas praduga tidak bersalah menjadi hambatan gerak bagi hakim dan jaksa karena harus mengadakan penyidikan terlebih dahulu jika menduga surat keterangan dokter tersebut palsu untuk kemudian dilaporkan secara terpisah.

### **1. Akibat hukumnya bagi terdakwa**

Akibat dari adanya surat palsu yang disertakan dalam proses peradilan untuk mendapatkan kemudahan terdakwa menggunakan hak-hak tidak hanya akan berakibat kepada terdakwa saja tetapi juga penasihat hukum dan dokter pribadi yang mengeluarkan surat tersebut pasti juga turut dicugai oleh jaksa dan hakim. Sistem peradilan Indonesia yang menganut asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocent*, tentu Jaksa akan mengadakan penyelidikan terhadap dugaan tersebut untuk membuktikan kebenaran sesungguhnya. Menurut bapak Heriyanto <sup>27</sup>“ terkadang untuk membuat mereka mengakui kesalahannya sebagai awal untuk melakukan penyelidikan dan dilaporkan secara terpisah harus diiringi dengan pernyataan bahwa kebenaran yang diberikan akan menolong terdakwa sendiri nantinya dengan janji berupa keringanan hukuman tetapi keterangan yang berbelit juga akan berakibat pada diperberat hukuman tersebut”.

*Due process of law* yang dianut proses hukum pidana Indonesia yang terwujud dalam asas praduga tidak bersalah, membuat kesetaraan antara terdakwa dan penegak hukum dalam proses pemeriksaan. Asas ini membuat jaksa dan hakim tidak dapat menduga seseorang bersalah tanpa alat bukti, di dalam butir (3) huruf C Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yaitu “setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>27</sup> *Loc.cit.* wawancara dengan bapak Heriyanto

Jaksa atau hakim menemukan kejanggalan atau kecurigaan dari penggunaan alasan sakit berkali-kali dan ditemukan indikasi diagnosa palsu dari pernyataan dokter. Maka “hakim akan memerintahkan jaksa untuk mengadakan penyidikan”<sup>28</sup>. Jika hasil penyidikan menunjukkan hasil sebaliknya tidak seperti yang ada dalam pernyataan dokter serta dokter yang dihadirkan hakim dan jaksa memberikan pernyataan yang mendukung hasil penyidikan. Kemudian “Jaksa akan melaporkan secara terpisah dengan tuduhan pembuatan surat palsu dan sebagai pertimbangan khusus karena mempersulit persidangan”<sup>29</sup>. Hampir sama dengan penuturan bapak Benny Sudarsono<sup>30</sup> yang menyatakan bahwa “surat keterangan dokter yang terbukti palsu dan sudah terbukti saat proses persidangan maka hakim melaporkan secara terpisah dengan tuduhan pembuatan surat palsu untuk beralasan tidak hadir dalam persidangan”.

Jika terbitnya surat dokter palsu didalam perkara terdakwa atas permintaan terdakwa yang disetujui oleh dokter dan merupakan saran dari pensihat hukumnya sudah dapat dibuktikan oleh jaksa. Perkara surat palsu sebenarnya sudah layak dilaporkan secara terpidah untuk dilakukan penyidikan sebagai perkara baru. Karena sudah memenuhi unsur-unsur pidana yang tertuang dalam pasal 242 KUHP. Surat dokter dengan diagnosa palsu yang diketahui hakim dan jaksa dapat memiliki akibat hukum bagi terdakwa itu sendiri, dokter dan penasihat hukum atau siapa saja yang turut serta dalam pembuatannya.

Pasal 132 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa “ dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli”. Orang ahli yang

---

<sup>28</sup> *IBID*

<sup>29</sup> *Op.Cit.* Hasil wawancara dengan bapak Moch. Heri ,SH. Selaku jaksa di kejaksaan negeri malang

<sup>30</sup> *Op.cit.* Hasil wawancara dengan bapak Benny Sudarsono, SH, MH selaku hakim di pengadilan negeri malang

dimaksud adalah dokter rutan atau dokter yang disediakan oleh hakim atau jaksa.

Pendapat dari ahli yang kedua atau pendapat selain dari dokter pribadi terdakwa atau *second opinion* dari dokter lain tetap diperlukan untuk membuktikan perkara sebenarnya. Membuktikan keadaan kesehatan terdakwa secara fisik dan psikis bukan ranah hakim atau jaksa sebab bukan orang yang berkompetensi di bidang kesehatan, pendapat dokter tersebutlah yang menjadi dasar jaksa dan hakim mendapatkan kebenaran materiil .

Akan tetapi hal berbeda bisa terjadi “jika dalam pembuatan surat tersebut dokter mendapatkan tekanan dari kuasa hukum maupun terdakwa yang mengancam keselamatan dirinya sehingga tidak bisa menghindari perbuatan tersebut, diposisi tersebut dokter berada dalam keadaan memaksa dan perbuatannya adalah *overmacht* akan menjadi pertimbangan dilihat dari seberapa berat ancaman tersebut”<sup>31</sup>.

Alasan keadaan memaksa atau *overmacht* tidak akan diterima hakim dan jaksa secara mutlak atau bulat-bulat tanpa melihat keadaan memaksa seperti apa yang diterima dokter saat pembuatan keterangan tersebut. Meminta keterangan dari terdakwa, penasihat hukum dan dokter untuk membuat rekonstruksi perkara yang telah lalu sehingga dapat ditarik kesimpulan sejauh mana upaya paksa yang dilakukan terdakwa atau kuasa hukumnya. Menggunakan senjata tajam atau senjata api, mengancam keamanan keluarga dokter tersebut dan lain-lain akan menjadi pertimbangan jaksa saat membuat laporan baru dan tentu akan memperberat sanksi dari terdakwa dan kuasa hukumnya.

Akibat hukum dari keputusan hakim atau jaksa yang telah memberikan dispensasi kepada terdakwa/tersangka adalah “batal demi hukum” sehingga jaksa atau hakim dapat terdakwa menjalankan proses pemeriksaan sebagaimana mestinya

---

<sup>31</sup> *Ibid*

## 2. Jaksa Dan Hakim Menentukan Terdakwa Siap Diperiksa Atau Tidak

Surat dokter palsu atau asli memang susah untuk dibedakan karena dibuat oleh orang ahli di bidangnya yaitu dokter, latar belakang pendidikannya serta profesinya yang di bawah kode etik kedokteran dan sumpah jabatan. Sehingga hakim harus mempercayai pertanyaan tersebut sampai ditemukan fakta sebaliknya<sup>32</sup>. Menjadikan jaksa dan hakim “*take it of granted*” atau lebih banyak menerima secara mutlak terhadap hasil pemeriksaan dokter pribadi, apabila surat tersebut baru digunakan terdakwa satu kali dalam permohonan dispensasi untuk tidak hadir dalam pemeriksaan.

Surat keterangan dokter yang menyatakan terdakwa sakit memang akan di terima oleh hakim atau jaksa, tetapi dalam memberikan dispensasi jaksa akan melihat apa saja yg dilampirkan terdakwa selain surat keterangan dokter tersebut yaitu:<sup>33</sup> “penyidik hanya menerima surat dokter yang dilengkapi dengan rekam medis kesehatan terdakwa dengan alasan jaksa dapat melihat riwayat penyakitnya dan tindakan medis yang pernah dilakukan dan dapat menjadi pertimbangan jaksa dalam memberikan kebijakan penangguhan penahanan menjadi tahanan kota atau pembantaran perkara hingga terdakwa dinyatakan sehat”. Hampir sama dengan penuturan bapak Djuanto, SH<sup>34</sup> “ jika dalam penyidikan oleh jaksa terdakwa sudah lebih dari satu kali beralasan sakit dengan surat keterangan dokter, apabila alasan yang sama digunakan juga pada saat pemeriksaan dipengadilan maka hakim memerintahkan kepada jaksa untuk mengadakan penyidikan terkait kebenaran kondisi kesehatan terdakwa”.

Padahal tidak menutup kemungkinan rekam medis yang sertakan merupakan rekam medis milik pasien lain dokter tersebut yang sudah meninggal misalnya sehingga isinya tidak sesuai kenyataan terdakwa. Kemudian digunakan

---

<sup>32</sup> *Op.cit.* Hasil wawancara dengan bapak Djuanto, SH.MH selaku hakim di pengadilan negeri malang

<sup>33</sup> *Op.Cit.* Hasil wawancara dengan bapak Novardi Andra ,SH. M.H

<sup>34</sup> *Op.cit.* Hasil wawancara dengan bapak Djuanto, SH.MH selaku hakim di pengadilan negeri malang

terdakwa dengan menggubah namanya untuk menunda atau membuat mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan. Perbuatan tersebut bisa saja terjadi karena dokumen tentang riwayat tindakan medis diarsipkan oleh dokter sementara dokter pribadi juga tidak hanya memiliki satu pasien saja tetapi ada banyak pasien dibawah penanganannya. Jika dilihat dari keaslian, dokumen tersebut asli hanya isi saja yang tidak sesuai dengan keadaan terdakwa sebenarnya.

Pembantaran yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pemantaran (Stuiting) tidak mengatur secara lengkap prosesnya suatu perkara dapat dibantarkan, syarat-syarat pembantaran, dan berhentinya suatu perkara yang dibantarkan atau kadaluarsa pembantaran.

Pembantaran bukan merupakan solusi bagi terdakwa yang sakit karena tidak ada diatur waktu yang jelas proses perkara tersebut dapat dilanjutkan atau masih memerlukan perpanjangan. KUHAP sebagai acuan hakim dan jaksa dalam berperkara tidak ada ketentuan cukup sehat atau tidak sehat secara fisik sehingga layak mengikuti persidangan. Berbeda dengan KUHP di Canada yang sudah mengatur secara spesifik mengenai siap tidaknya seorang terdakwa dalam menjalankan proses peradilan atau yang bisa disebut *fit or unfit for trial*, dalam KUHP Canada diatur sebagai berikut<sup>35</sup>:

1. Tidak dapat memahami ruang persidangan, tidak mengetahui alasan berada disana dan tidak mampu mengenali hakim, jaksa dan penasihat hukum. Untuk apa diruangan tersebut.
2. Tidak mengetahui akibat hukum dari tuntutan, tidak memahami seperti apa pembelaan dan akibatnya jika mengaku bersalah serta sesuatu yang bisa terjadi jika tidak mengatakan kebenaran.
3. Tidak mampu berkomunikasi dengan pengacaranya sehingga tidak mampu membuat agumentasi hukum guna pembelaannya bahkan tidak tahu apa yang mereka ingin lakukan dengan kasusnya.

---

<sup>35</sup> No name. *Fitness To Stand Trial*.artikel. <http://www.schizophrenia.on.ca/getattachment/Resources/Educational-Resources/Printable-Resources/3-Fitness-to-Stand-Trial-FINAL-EN.Pdf.aspx>

Adanya aturan siap atau tidak siap seorang terdakwa menghadapi persidangan tentu akan memudahkan hakim dan jaksa dalam bertugas, melihat aturan KUHP Canada tersebut para penegak hukum cukup melihat kebalikan dari pernyataan aturan diatas dan membandingkan kenyataan terdakwa tanpa harus menyiapkan dokter untuk melakukan pemeriksaan ulang, sudah dapat menentukan seorang terdakwa layak atau tidak dilakukan pemeriksaan. Menurut hemat penulis cara ini sangat tepat untuk menciptakan peradilan cepat Sementara di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tidak ada ketentuan yang mengatur suatu perkara dapat dinyatakan kadaluarsa dalam pemeriksaan. Pak Djuanto menjelaskan<sup>36</sup> “Selama terdakwa masih hidup maka harus ditunggu sampai dinyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga layak untuk lakukan pemeriksaan”. A. Mukti Arto<sup>37</sup> mengungkapkan “yang diinginkan pencari keadilan adalah dapat menyelesaikan atas perkaranya secara efektif, efisien, tuntas dan final.

Pentingnya *second opinion* sangat penting dalam pembuktian, dapat dilihat dari kasus korupsi yang dilakukan Soeharto di tahun 2006 yang lalu terkait pembantaran karena sakit yang telah dibuktikan oleh tim dokter independen kejaksaan agung sehingga diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3), akan tetapi terbitnya surat ketetapan tersebut tidak berakibat pada berhentinya proses penyidikan karena proses penyidikan dapat dihentikan apabila perkara tersebut dianggap tidak cukup bukti. Padahal dugaan kasus korupsi tersebut terjadi pada tahun 2000 tetapi hingga soeharto meninggal belum mendapatkan pertanggung jawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan.

Adanya ketentuan yang mengatur tentang perjalanan dokter tersebut saat menangani pasien yang menjadi seorang terdakwa serta lama hubungan pasien

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Op.cit.* Sidik Sunaryo. Hal 28

dan dokter sehingga pendapatnya layak diterima oleh hakim dan jaksa, misalnya<sup>38</sup>:

1. Jarak waktu yang dapat diterima antara pemeriksaan terakhir dan tanggal laporan
  - a. Hubungan antara dokter dan pasien
  - b. Apakah kondisi pasien sementara atau permanen
2. Dalam perkara yang dapat diterima
  - a. Lama dokter mengenal pasien sebagai pasien sesekali atau rawat jalan
  - b. Lama pasien menjalani pengobatan.
  - c. Untuk penyakit permanen dengan menunjukkan bukti-bukti
  - d. Untuk penyakit bukan permanen dapat menentukan kapan pasien sembuh

Jika ada pengaturan yang jelas seperti diatas surat keterangan dokter yang menjadi dasar pemenuhan hak pengobatan bagi terdakwa yang sakit akan menjadi efektif, karena telah diatur prosedurnya. Sementara hakim dan jaksa tidak perlu takut mendapatkan intervensi atau tekanan kuasa hukum dan dokter pribadi terdakwa, karena apa yang dilakukan sesuai peraturan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Surat keterangan dokter dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dan jaksa untuk memberikan dispensasi proses pemeriksaan bagi terdakwa yang sakit yaitu berupa penundaan pemeriksaan, pengalihan penahanan menjadi tahanan kota, atau pembantaran. Jaksa dan hakim lebih memilih pembantaran bagi terdakwa dengan riwayat penyakit menahun karena dianggap lebih efisien tidak membuat masa perpanjangan penahanan habis. Pebantaran menjadi solusi bagi hakim dan jaksa ketika terdakwa mengalami sakit yang memerlukan tindakan medis di luar RUTAN, tetapi pembantaran sendiri tidak diatur secara jelas prosedur dan masa kadaluarsanya, sementara pada pasal 78 ayat (1) KUHP

---

<sup>38</sup> *Loc.cit.* No name. *Fitness To Stand Trial*. artikel

diatur mengenai kadaluarsa penuntutan. Di samping itu KUHAP dan KUHP juga tidak mengatur secara jelas sehat dan sakit seorang terdakwa layak untuk menjalani proses hukum.

2. Jaksa dan hakim harus menerima pendapat ahli sampai menemukan bukti sebaliknya. Jika jaksa atau hakim memiliki dugaan surat keterangan dokter yang digunakan terdakwa dalam mengajukan permohonan adalah palsu, maka hakim akan memerintahkan jaksa atau jaksa akan mengadakan penyelidikan mengenai kebenaran kesehatan terdakwa sebenarnya. Jika dugaan tersebut terbukti benar maka akan dilakukan pemeriksaan ulang oleh dokter yang disediakan oleh hakim atau jaksa. Kemudian akan dilaporkan secara terpisah dengan tuduhan pembuatan surat palsu pasal 242 ayat (1) KUHP ancaman pidana tujuh tahun, dan dokter dapat diancam pidana empat tahun sesuai 267 KUHP ayat (1).

## **B. Saran**

1. Sebaiknya ada pengaturan KUHAP dan KUHP mengenai surat dokter dan prosedurnya penggunaan dalam proses peradilan acuan hakim dan jaksa dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, agar tidak terjadi kekosongan aturan atau norma hukum yang dapat digunakan terdakwa untuk menunda proses pemeriksaan. Karena selama ini didalam KUHAP dan KUHP tidak diatur mengenai ketentuan sehat dan sakit atau (*fit and unfit to the trial*) dalam proses peradilan. Selain itu perlu adanya masa kadaluarsa pembantaran serta prosedur penerapannya sehingga tidak akan terjadi penumpukan perkara serta kadaluarsanya penuntutan.
2. Seharusnya ada ketentuan yang mengatur surat keterangan dokter yang oleh terdakwa dijadikan dasar mengajukan permohonan harus disertakan juga pendapat dokter dari RUTAN sehingga dapat dipertanggungjawabkan keaslian diagnosanya dan tidak memunculkan dugaan bahwa isi surat keterangan dokter tersebut palsu. Sehingga jaksa tidak perlu mengadakan penyidikan dan bisa



tetap fokus pada perkara yang ditangani serta dapat meminimalisir keberadaan surat keterangan dokter dengan diagnosa palsu dalam proses peradilan



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anwar Sutoyo.2009. *Pemahaman Individu, Observasi,checklist, Interviu, kuesioner, dan Sosiometri*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Bambang waluyo. *SistemPembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. 1992. Sinar Grafika. Bandung.
- Lamintang-Theo lamintang. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*. 2010. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
- Moleong L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- P..A. F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Dan YurisPrudensi*. Sinar grafika. Jakarta.
- Sidik Sunaryo. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. 2004. UMM Press. Malang
- Soejono soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui-pres. Jakarta.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Malang. UMM Press.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. 2012. Sinar Grafika. Jakarta.

### JURNAL

- Hasyim hasanah “teknik-teknik observasi (sebuah alternative metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial), dalam jurnal at-taqaddum, vol 8, no 1, juli 2016.

No name. *Fitness To Stand Trial*.artikel. <http://www.schizophrenia.on.ca/getattachment/Resources/Educational-Resources/Printable-Resources/3-Fitness-to-Stand-Trial-FINAL-EN.Pdf.aspx>

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan bapak Benny Sudarsono, SH, MH selaku hakim di pengadilan negeri malang pada hari senin 3 agustus 2018

Hasil wawancara dengan bapak Benny Sudarsono, SH, MH selaku hakim di pengadilan negeri malang pada hari senin 3 agustus 2018

Hasil wawancara dengan bapak Djuanto, SH.MH selaku hakim di pengadilan negeri malang pada hari senin 3 agustus 2018

Hasil wawancara dengan bapak Moch. Heri ,SH, selaku jaksadi kejaksaan negeri malang, pada hari kamis 30 Agustus 2018

Hasil wawancara dengan bapak Novardi Andra ,SH. M.H, selaku kepala seksi pidana umum di kejaksaan negeri malang, pada hari kamis 30 Agustus 2018

Hasil wawancara dengan bapak Novardi Andra ,SH. M.H, selaku kepala seksi pidana umum di kejaksaan negeri malang, pada hari kamis 30 Agustus 2018

### **Internet**

Id.m. Wikipedia.org diakses 2 agustus 2018

Kartono Muhamad. Surat Keterangan Dokter Tinjauan Dari Aspek Kedokteran. <https://www.academia.edu>. Diakses 14 Nov 2017

Kick andry. Macam-macam Surat keterangan dokter.http / /www.scribd.com. diakses 14 Nov 2017.